

## THE ROLE AND CHALLENGES ISLAMIC EDUCATION FOR RESHAPING THE NATION CHARACTER

**Dr. Mukhibat**

### ABSTRAK

*Pendidikan karakter telah menjadi bagian penting dari sistem pendidikan nasional dan menjadi salah satu langkah menyembuhkan penyakit sosial. Kebijakan ini, secara tidak langsung memunculkan anggapan ketidakpercayaan terhadap peran pendidikan Islam untuk mencegah adanya berbagai penyakit sosial. Pendidikan Islam belum dianggap menjadi sumber nilai dalam membentuk karakter bangsa dan ini menempatkan pendidikan Islam dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pertanyaannya, apakah ada yang salah dalam praktek pendidikan Islam selama ini. Masuknya ranah pendidikan Islam dalam pemerintahan (publik) seharusnya menciptakan harapan baru bagi umat Islam untuk lebih mewarnai nilai-nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selain sebagai sarana tafaqquh fi al-din juga sebagai tarbiyatul khuluq bangsa Indonesia.*

*Kondisi objektif terlihat pada berbagai data hasil penelitian, seperti yang kemukakan oleh (Muhaimin 2005, Nurdin, 2008, Tasman Hamami, 2007, Bambang Muttaqin, 2012) proses pembelajaran agama Islam belum dilaksanakan secara optimal, sehingga peran pendidikan Islam sebagai tarbiyatul khuluq belum dapat dicapai. Hal ini disebabkan: 1) Pendidikan agama Islam selama ini dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran yang kurang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 2) materi PAI yang lebih banyak bersifat teori, terpisah-pisah, terisolasi atau kurang terkait dengan mata pelajaran lain, 3) model pembelajarannya bersifat konvensional. Dilema semacam ini menjadi contoh yang memperlihatkan betapa entitas pendidikan Islam tidak lagi mampu membentuk manusia berkarakter. Pengkajian kembali pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam, semakin mendesak apabila dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan di atas. Kebijakan adanya pendidikan karakter memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi guru-guru pendidikan Islam untuk lebih memutakhirkan pembelajarannya sesuai dengan tuntutan perkembangan dan melakukan reorientasi visi dan misi pendidikan Islam baik sebagai lembaga dakwah, lembaga akademik-ilmiah, maupun sebagai penyedia tenaga profesional.*

*Salah satu bentuk pemutakhiran pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islam dalam semua materi pendidikan. Namun Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran metafisis-filosofis tetapi*



Ranggawarsita terhadap realitas sosial, sekitar, 140-an tahun yang lalu melalui "Serat Kalatida". Dalam serat ini antara lain dijelaskan adanya istilah "zaman edan". Bahkan menariknya, istilah "zaman edan" ini semakin populer di kalangan masyarakat pada era modern sekarang ini<sup>527</sup>. Istilah tersebut dipandang sangat cocok dengan perkembangan sekarang ini yang ditandai dengan kemerosotan akhlak, aspek moralitas, dan etika kesantunan, tindak kekerasan, serta lemahnya jati diri bangsa.

Sekarang ini telah tumbuh kesadaran betapa mendesaknya agenda untuk melakukan terobosan guna membentuk dan membina karakter peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Sejumlah ahli pendidikan mencoba untuk merumuskan konsep-konsep tentang pendidikan karakter, dan sebagiannya lagi bahkan sudah melangkah jauh dengan mempraktekannya. Namun demikian, masih perlu lebih jauh, apa sesungguhnya isi dan proses yang hendak dijalankan oleh pendidikan karakter bangsa ini. Bagaimana karakter sebagai sebuah kebajikan (*virtue*) dipahami, nilai-nilai moral manakah yang ingin diajarkan dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia, sehingga dianggap sebagai nilai moral yang otentik bangsa Indonesia, mengingat bangsa Indonesia sejak dulu mempunyai nilai agama, nilai budaya, dan nilai Pancasila.

Dari sekian banyak wacana pendidikan karakter, menurut hemat penulis, konsep pendidikan karakter sekarang belum sepenuhnya mampu memberikan jawaban atas pertanyaan di atas. Boleh jadi, bagi para pelaku atau praktisi pendidikan karakter, pertanyaan-pertanyaan di atas tidak penting untuk dicari jawabannya karena tidak memberi solusi praktis terhadap problem pendidikan. Sebagai pendidik muslim pertanyaan-pertanyaan tersebut, sangat penting untuk dikemukakan apabila dikaitkan dengan eksistensi dan peran pendidikan Islam dalam ikut membangun moral bangsa ini.

Kondisi objektif terlihat pada berbagai data hasil penelitian, seperti yang kemukakan oleh (Muhaimin 2005, Nurdin, 2008, Tasman Hamami, 2007, Bambang Muttaqin, 2011) proses pembelajaran pendidikan Islam baik di sekolah umum maupun di sekolah agama, belum dilaksanakan secara optimal, sehingga peran pendidikan Islam sebagai *tarbiyatul khuluq* belum dapat dicapai.

Pengkajian kembali pelaksanaan pembelajaran pendidikan Islam di lembaga pendidikan Islam, semakin mendesak apabila dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan di atas. Kebijakan adanya pendidikan karakter memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi guru-guru pendidikan Islam untuk lebih memutakhirkan pembelajarannya sesuai dengan tuntutan perkembangan. Sebenarnya dalam Pendidikan Islam mempunyai istilah-istilah yang tepat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran berkarakter, yaitu: *tilâwah*, *ta'lim*, *tarbiyah*, *ta'dib*, *tazkiyah* dan *tadlrib*. *tilâwah* menyangkut kemampuan membaca; *ta'lim* terkait dengan pengembangan kecerdasan

---

<sup>527</sup> Baca Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1999), p. 189.



prilaku ketika melaksanakan berbagai aktivitas apakah secara efektif melaksanakan dengan jujur atau sebaliknya, apakah dapat mematuhi hukum yang berlaku atau tidak<sup>532</sup>.

Adapun pendidikan karakter bagi Doni Koesoema adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri<sup>533</sup>. Bagi Doni pendidikan karakter harus bersifat membebaskan. Alasannya, hanya dalam kebebasannya individu “dapat menghayati kebebasannya sehingga ia dapat bertanggung jawab atas pertumbuhan dirinya sendiri sebagai pribadi dan perkembangan orang lain dalam hidup mereka”<sup>534</sup>.

Pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai upaya untuk mempromosikan dan menginternalisasikan nilai-nilai utama, atau nilai-nilai positif kepada warga masyarakat agar menjadi warga bangsa yang percaya diri, tahan uji dan bermoral tinggi, demokratis dan bertanggung jawab serta survive dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan karakter juga senantiasa mengembangkan akhlak mulia dan kebiasaan yang baik bagi para peserta didik<sup>535</sup>. Objek pendidikan karakter adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut didapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui, yang membutuhkan waktu sehingga terbentuklah pekerti yang baik sesuai dengan nilai yang ditanamkan.<sup>536</sup>

Pengembangan pendidikan karakter, harus dilakukan secara komprehensif oleh pendidik dengan bekerja sama dengan keluarga atau orang tua/wali peserta didik. Bahkan, menurut Cletus R. Bulach<sup>537</sup> pendidik dan orang tua perlu membuat kesepakatan tentang nilai-nilai utama apa yang perlu dibelajarkan misalnya: *respect for self, others, and property; honesty; self-control/discipline*.

Thomas Lickona<sup>538</sup> menyebutkan beberapa nilai kebaikan yang perlu dihayati dan dibiasakan dalam kehidupan peserta didik antara lain kejujuran, kasih sayang, pengendalian diri, saling menghargai atau menghormati, kerjasama, tanggung jawab, dan ketekunan. Pendidikan karakter bukan sekadar memiliki dimensi integratif, dalam arti mengukuhkan moral intelektual peserta didik atas dasar nilai-nilai kebaikan, sehingga menjadi pribadi yang mantap dan tahan uji, pribadi-pribadi yang cendekia, mandiri dan bernurani, tetapi juga bersifat kuratif secara personal maupun sosial.

<sup>532</sup> *Ibid.*, 6

<sup>533</sup> A. Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak, di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2010), p. 194.

<sup>534</sup> *Ibid.*

<sup>535</sup> Kirsten Lewis, “Character Education Manifesto”, *News*, (Boston University, 1996), p. 8

<sup>536</sup> Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), p. 38.

<sup>537</sup> Cletus R. Bulach, “Implementing a Character Education Curriculum and Assessing Its Impact on Student Behavior”, *ProQuest Education Journal*, (Dec.2002), 80, <http://www.jstor.org/pss/30189797>, diunduh, 22 Juni 2011.

<sup>538</sup> Thomas Lickona, “Talks About Character Education”, wawancara oleh Early Childhood Today, *Pro Quest Education Journal*, (April, 2000), p. 48, <http://webcache.googleusercontent.com>, diunduh, 20 April 2010.



untuk memahami, menyikapi dan ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah-masalah sosio-kebangsaan yang ada<sup>540</sup>.

### C. Kebenaran Nilai Moral: Antara Relativism Moral dan Absolute Moral

Pemaknaan pendidikan karakter seperti di atas, telah memposisikan pendidikan karakter menjadi salah satu langkah untuk menyembuhkan penyakit sosial<sup>541</sup>. Namun demikian hal penting yang dipertanyakan dalam pendidikan karakter adalah nilai-nilai moral manakah yang ingin dikembangkan?. Sehingga akan diketahui secara pasti karakter seperti apa yang ingin dibentuk di Indonesia ini. Sebagaimana dipahami bahwa bangsa Indonesia mempunyai beberapa sumber nilai, seperti nilai agama, budaya, dan nilai Pancasila. Pertanyaan demikian membawa perdebatan pada wilayah etika normatif yakni prinsip dan norma moral manakah yang sehat yang dapat dijadikan acuan dan dasar pertanggungjawaban rasional bagi penilaian dan putusan moral.

Terhadap masalah ini ada dua kelompok yang pendapat yang berbeda. Satu kelompok berpendapat bahwa kebenaran moral itu relatif (*moral relativism*). Moral baik dan buruk tergantung pada bagaimana individu mendefinisikan. Berdasar teori ini, prinsip moral baik yang berasal dari agama, budaya, dan Pancasila bukan suatu yang *innate*, alami atau mengandung keabadian tetapi sesuatu yang dikonstruksikan oleh lingkungan sosial. Bangsa Indonesia terdiri dari latar belakang sosial, maka nilai-nilai yang dianut juga beragam sehingga tidak berlaku adanya kebenaran nilai yang berkaku absolut. Nilai dianggap benar tergantung dari siapa yang mendefinisikan. Sehingga sering muncul pertanyaan sinis terhadap pendidikan karakter “*whose is values*” (moral menurut siapa).<sup>542</sup>

Kelompok lain berpendapat bahwa kebenaran moral bersifat absolut (*absolute moral*). Kelompok ini sangat percaya bahwa ada standar moral yang berlaku umum yakni standar yang berlaku absolute, universal, di mana agama dan budaya pasti mengakuhinya. Seperti *care* (kasih sayang), *respect* (saling menghormati), *responsible* (bertanggung jawab), *integrity* (integritas), *harmony* (keseimbangan) adalah nilai moral universal yang absolute kebenarannya. Kelompok ini juga menganggap moral universal juga bersumber dari agama-agama yang ada yaitu prinsip *golden rule*<sup>543</sup>.

<sup>540</sup> Beberapa masalah sosio-kebangsaan sebagaimana sudah disinggung di muka seperti: berbagai bentuk anarkhisme dan tindak kekerasan, perilaku amoral dan luntarnya budi pekerti, korupsi, kolusi dan nepotisme, serta ketidakjujuran, budaya nerabas dan tidak disiplin, semau gue dan rendahnya kepedulian terhadap lingkungan, sampai pada merosotnya rasa ke-Indonesiaan.

<sup>541</sup> Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik Anak Bangsa, di Zaman Global* (Jakarta: Grasindo, 2010), p. 116.

<sup>542</sup> Ratna Megawangi, *Pendidikan Karakter, Solusi Tepat untuk Membangun Bangsa*, (Jakarta: IHF dan BP Migas, 2004), p. 98.

<sup>543</sup> *Ibid.*, p. 99.



Pendidikan karakter merupakan petunjuk (*directive*) dari pada kebebasan memilih (*non directive*), pendidik, orang tua berhak menentukan nilai-nilai apa yang seharusnya. Sekolah perlu membantu anak untuk memahami, memperhatikan dan bertindak berdasar nilai-nilai itu di dalam kehidupannya.

Thomas Lickona<sup>545</sup> menyebut bahwa karakter yang baik meliputi tiga bagian yakni:

1. "*Knowing the good*". Untuk membentuk karakter, anak tidak hanya sekedar tahu mengenai hal-hal yang baik, namun mereka harus dapat memahami kenapa perlu melakukan hal tersebut. "Selama ini banyak orang yang tahu bahwa ini baik dan itu buruk, namun mereka tidak tahu alasannya apa dan masih terus melakukan hal-hal yang tidak baik, jadi masih ada gap antara *knowing* dan *acting*,"
2. "*Feeling the good*". Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. Disini anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. "Jika *Feeling the good* itu sudah tertanam, itu akan menjadi "*engine*" atau kekuatan luar biasa dari dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan atau mengerem dirinya agar terhindar dari perbuatan negative".
3. Yang coba ditumbuhkan adalah "*Acting the good*". Pada tahap ini, anak dilatih untuk melakukan perbuatan baik. Tanpa melakukan, apa yang sudah diketahui atau dirasakan oleh seseorang, tidak akan ada artinya. Jadi, selama ini di sekolah, anak tidak dilatih untuk melakukan hal-hal yang baik. "Selama ini hanya himbauan-himbauan saja. Sementara, melakukan sesuatu yang baik itu harus dilatih, sehingga hal tersebut akan menjadi bagian dari kehidupan mereka".

Pada intinya bentuk karakter apa pun yang dirumuskan tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai universal. Oleh karena itu, pendidikan yang mengembangkan karakter adalah bentuk pendidikan yang bisa membantu mengembangkan sikap etika, moral dan tanggung jawab, memberikan kasih sayang kepada anak didik dengan menunjukkan dan mengajarkan karakter yang bagus. Hal itu merupakan usaha intensional dan proaktif dari sekolah, masyarakat dan negara.

#### **D. Reinventing Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa**

Gambaran mengenai pendidikan karakter di Indonesia sekarang ini setidaknya dapat dilihat dari dua naskah yakni Rencana Induk Pendidikan Karakter Bangsa Terbitan Pemerintah Republik Indonesia (2010) dan Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa terbitan Pusat Kurikulum, Kemendiknas (2010). Berdasarkan buku tersebut nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut:

---

<sup>545</sup> Ibid., p. 11



Mengutip pendapatnya William Kymlika dalam Felix Baghi<sup>547</sup> sumber suatu karakter atau jati diri bangsa di manapun umumnya ada tiga yakni asal usul etnis, iman religius dan gagasan mengenai kebaikan bersama. Asal usul etnis dalam hal ini budaya, iman religius dalam hal ini agama dan kebaikan bersama dalam hal ini adalah Pancasila sebagai gagasan sosial politik. Nilai-nilai tersebut diangkat menjadi sumber nilai yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter di Indonesia. Sehingga dapat dikatakan nilai-nilai dalam tujuan pendidikan nasional pada hakekatnya adalah nilai-nilai yang diangkat dari ketiga sumber tersebut. Nilai-nilai dalam tujuan pendidikan suatu saat akan berganti jika ada perubahan perundangan, sementara nilai dan tiga sumber sebelumnya relatif tetap.

Diangkatnya nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai yang tertuang dalam tujuan pendidikan nasional sebagai sumber pendidikan karakter, menunjukkan diakuinya gagasan mengenai *absolute moral* dalam arti nilai yang disepakati dan penting. Nilai tersebut baik secara politis maupun yuridis memang telah menjadi kesepakatan bangsa. Namun demikian nilai-nilai Pancasila itu sendiri secara sosiologis belum tentu dijadikan sebagai sumber dari pendidikan karakter bagi sebagian kelompok masyarakat, oleh karena itu pelaku pendidikan karakter dapat saja mengandalkan sumber nilai lain seperti agama dan budaya. Pancasila baik sebagai konsep politik maupun akademis sampai sekarang selalu menghasilkan keragaman pemikiran.

Gagasan yang mirip dengan *relativism moral* nampak juga dalam kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. Hal ini tercermin dari pernyataan “sekolah dan guru dapat menambah ataupun mengurangi nilai-nilai tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani sekolah dan hakekat dari SK/KD dan materi bahasan suatu mata pelajaran”<sup>548</sup>. Namun demikian perlu dipertanyakan apakah para pelaku pendidikan karakter memiliki kesadaran bahwa pernyataan di atas diartikan sebagai suatu kebebasan untuk menentukan nilai-nilai karakter sesuai dengan kebutuhan masyarakat di mana peserta didik belajar. Pernyataan demikian penting untuk diketahui oleh karena gagasan *relativism moral* berasal dari kemajuan ilmu-ilmu sosial seperti Antropologi, Etnologi, Sosiologi, dan Sejarah serta kemajuan teknologi informasi yang telah berkontribusi besar dalam mengembangkan pemahaman tentang perbedaan-perbedaan cara berpikir, bersikap berperilaku kelompok bangsa atau masyarakat. Pemahaman seperti ini melahirkan pandangan pluralisme budaya, sikap toleransi terhadap perbedaan nilai bahkan pandangan bahwa moral itu relatif tergantung pada masyarakatnya.<sup>549</sup>

---

<sup>547</sup> Felix Baghi, *Kewarganegaraan Demokratis dalam Sorotan Filsafat Politik*, (Maumere: Ledarero, 2009), p. 261.

<sup>548</sup> Kemendiknas RI, *Pengembangan Pendidikan*, p. 10.

<sup>549</sup> Sudarminta, *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya, 1997), p. 13.



dalam kebudayaan dan Pancasila dalam religius, setelah itu Pancasila dalam Negara atau dikenal dengan istilah Pancasila dalam tri-prakara<sup>552</sup>. Dibandingkan dengan dua nilai sebelumnya, nilai Pancasila lebih bersifat consensus nilai, nilai etik bersama dan menjadi integrasi nilai. Namun nilai Pancasila tidak sekuat nilai agama dan budaya dalam menyakinkan individu akan kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila lebih menyakinkan individu akan kebaikan dan kebenarannya. Nilai Pancasila lebih merupakan sebuah identitas yang dikonstruksikan guna membangun keberlangsungan bangsa.

Manakah yang harus diutamakan dari ketiga nilai tersebut dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing? Thomas Lickona menyatakan negara yang mengakui agama, maka pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan agama dan sekolah agama, sedang negara yang tidak mengakui agama, pendidikan moralnya diajarkan melalui pendidikan kewarganegaraan (*civics*). Pernyataan ini dapat diartikan bahwa di negara non sekuler nilai moral agama menjadi basis pendidikan karakter, sedangkan di negara-negara sekuler yang umumnya ada di Barat, menggunakan pendidikan kewarganegaraan sebagai sarana bagi pendidikan moral yang sumber nilainya berasal dari gagasan-gagasan sosial politik sekuler, tidak ada kaitannya dengan agama dan hal itu dilakukan di sekolah publik. Paham sekularisme dianggap mampu menyelesaikan konflik hubungan agama dan negara, termasuk dengan memisahkan secara tegas antara sekolah agama dengan sekolah publik.

Dalam konteks bangsa Indonesia, tidak mungkin bisa dilakukan. Indonesia adalah Negara bukan sekuler dan bukan pula Negara agama. Masyarakat Indonesia sangatlah beragam dari sisi agama dan kebudayaan. Pada lembaga-lembaga pendidikan keagamaan praktis tidak ada masalah jika nilai-nilai moral agama menjadi dasar dalam pendidikan karakter. Lain halnya pada lembaga pendidikan publik (negeri), nilai-nilai apakah yang sesuai yang akan dikembangkan bisa memunculkan problem tersendiri. Motto “Bhineka Tunggal Ika” menuntun pada bangsa Indonesia mengakui identitas kewarganegaraan yang terbedakan (*diferensiated citizenship*) dalam agama dan juga budaya. Namun demikian semua warga masyarakat Indonesia harus mendukung identitas kewarganegaraan nasional (*national citizenship*). Kondisi demikian menjadikan pendidikan karakter harus mampu mengakomodasi nilai-nilai agama dan budaya dan juga nilai Pancasila. Untuk itu kemungkinan terjadinya pertentangan antar berbagai pihak mengenai pilihan nilai bisa saja terjadi. Pertanyaannya kemudian adalah nilai apa yang seharusnya dikembangkan dalam proses pendidikan sehingga akan menjadi nilai khas bangsa Indonesia dan juga akan melahirkan pendidikan karakter yang otentik bangsa Indonesia?. Terhadap masalah demikian Doni Koesoema menyarankan agar tidak terjadi pertentangan nilai dalam mengadopsi, sebaiknya

---

<sup>552</sup> Notonegoro, *Pancasila secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: CV Pantjuran Tudjuh, 1980), p. 17.



## E. Peran dan Peluang Pendidikan Islam dalam Membentuk Karakter Bangsa

Sebagaimana dijelaskan dibagian depan bahwa, di antara ketiga sumber nilai tersebut itu, yakni agama, budaya dan gagasan sosial politik Pancasila, bahwa nilai ajaran agamalah yang paling kuat menghujam atau mempatri dalam diri seseorang, karena ajaran agama tidak hanya menjangkau masa kini tetapi mampu memberikan keyakinan akan hari kemudian. Ini menjadi kelebihan bagi pendidikan karakter yang berbasis nilai agama. Ajaran agama sebagai sumber nilai dianggap *absolute moral* oleh pendukungnya. Pertanyaannya, mampukan ajaran agama Islam menjadi sumber nilai yang bersifat universal sehingga konsep *rahmatan lil alamin* dalam Islam dapat diwujudkan. Inilah yang menurut penulis adalah peluang yang harus ditampilkan oleh para pemikir dan praktisi pendidikan Islam.

Dalam konteks itu, pendidikan Islam mempunyai istilah-istilah yang dapat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran berkarakter, seperti: *tilâwah*, *ta'lim*, *tarbiyah*, *ta'dib*, *tazkiyah* dan *tadlrib*. *Tilâwah* yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang sesungguhnya dalam menggerakkan pendidik muslim untuk lebih melibatkan diri dalam kerja dan pengembangan pendidikan karakter bangsa. Istilah *ta'lim* terkait dengan pengembangan kecerdasan intelektual (*intellectual quotient*). *Tarbiyah* menyangkut kepedulian dan kasih sayang secara naluriah yang didalamnya ada asah, asih dan asuh. *Ta'dib* terkait dengan pengembangan kecerdasan emosional (*emotional quotient*). *Tazkiyah* terkait dengan pengembangan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*); dan *tadlrib* terkait dengan kecerdasan fisik atau keterampilan (*physical quotient* atau *adversity quotient*). Istilah-istilah tersebut menegaskan bahwa Islam sejak lahirnya adalah agama dengan misi moral yang tinggi, sebagaimana pernyataan nabi Muhammad saw “Bahwasanya aku diutus (Allah) untuk menyempurnakan keluhuruan budi”.<sup>555</sup>

Istilah-istilah di atas, menjadi bukti yang autentik akan tingkat apresiasi al Qur'an terhadap pendidikan manusia. Bagi umat Islam, semua ini menjadi dasar teologis yang sangat kuat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menindak lanjuti, dengan melibatkan diri dalam pengembangan karakter bangsa yang bersumber dari ajaran Islam. Selain itu, istilah-istilah tersebut di atas, sebagai bukti bahwa al Qur'an telah memberikan kerangka aksiologis yang jelas di samping tentu saja kerangka ontologis dan epistemologis tentang tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam dalam tataran metafisis-filosofis dan praksisnya sangat kaya dengan pertimbangan teologis, spiritual, etis, moral.

Namun demikian, perlu dilihat kenyataannya di lapangan, apakah praksis pendidikan Islam sudah sesuai yang pesan dalam al Qur'an. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh (Muhaimin 2005, Nurdin, 2008, Tasman Hamami, 2007, Bambang

<sup>555</sup> H. Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta: Rajawali, 2009), 2.



agama perlu dikembangkan dalam keakraban wacana melalui proses perenungan yang dalam dan proses dialogis yang produktif dan kritis. Dalam konteks ini peserta didik dibiarkan melakukan perambahan batin dan intelektual sehingga kelak menemukan dalam dirinya kedewasaan dalam beragama, baik dalam hal afeksi religiusnya maupun dimensi intelektualnya. Maka, peran pendidik di sini, hanya sebagai mitra dialog bagi peserta didik. Munculnya perilaku keagamaan yang belakangan disebut dengan istilah *fundamentalisme*, radikalisme, kekerasan atas nama agama, tawuran, korupsi, dan lain sebagainya, bisa jadi pangkal pada kelemahan-kelemahan metodologi dalam pendidikan agama seperti digambarkan di atas.

Sebagai akibat adanya kelemahan di atas, maka persoalan yang muncul adalah pendidikan agama kurang terintegrasi atau terjadi dualisme-dikotomik dengan disiplin keilmuan yang lain.

Persoalannya adalah bagaimana memunculkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari pendidikan Islam. Sebagaimana diketahui bahwa inti pendidikan Islam adalah *tarbiyatul khuluk*, sehingga sebenarnya pelaksanaan pendidikan Islam sejak lahirnya Islam sampai sekarang seharusnya dalam rangka memperbaiki dan membentuk akhlak yang sesuai dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dalam kerangka teologis-filosofis bukan hanya berhenti pada metafisis-filosofis. Realitas Maka, upaya untuk mengkaji kembali pelaksanaan pembelajaran PAI semakin mendesak apabila dikaitkan dengan kenyataan di lapangan yakni, seperti krisis akhlak yang ditandai banyaknya kejahatan, perkelahian antar pelajar, perilaku seks bebas dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Berdasarkan hal-hal di atas tidak ada cara lain yang dapat dilakukan oleh pendidik muslim kecuali memutakhirkan pembelajarannya dengan memasukkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari ajaran Islam dalam kurikulum. Salah satu bentuk pemutakhiran pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islam dalam semua materi pendidikan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran metafisis-filosofis tetapi harus sudah pada *body of knowledge* yang dapat memberi gambaran yang utuh tentang nilai-nilai Islam dalam materi-materi pendidikan.

Bentuk integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan melalui pintu kurikulum yang sekarang disebut dengan KTSP. Integrasi nilai-nilai Islam dalam KTSP dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

## 1. Perencanaan

Integrasi nilai-nilai Islam memerlukan kegiatan perencanaan yang memadai, baik dalam bentuk perencanaan pelaksanaan pembelajaran maupun penataan lingkungan belajar. Produk dari kegiatan ini adalah rancangan pelaksanaan pembelajaran. Penataan



keras, patriotisme, cinta damai, peduli lingkungan sosial, dan tanggung jawab. Diantara ketiga sumber nilai tersebut, bahwa nilai ajaran agamalah yang paling kuat menghujam atau mempatri dalam diri seseorang, karena ajaran agama tidak hanya menjangkau masa kini tetapi mampu memberikan keyakinan akan hari kemudian. Ini menjadi kelebihan bagi pendidikan karakter yang berbasis nilai agama.

Pendidikan Islam mempunyai istilah-istilah yang dapat digunakan sebagai pendekatan pembelajaran berkarakter, seperti: *tilâwah*, *ta'lim*, *tarbiyah*, *ta'dib*, *tazkiyah* dan *tadlrib*. *Tilâwah* yang dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi dan motivasi yang sesungguhnya dalam menggerakkan pendidik muslim untuk lebih melibatkan diri dalam kerja dan pengembangan pendidikan karakter bangsa. Istilah-istilah di atas, menjadi bukti yang autentik akan tingkat apresiasi al Qur'an terhadap pendidikan manusia. Semua ini menjadi dasar teologis yang sangat kuat, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menindak lanjuti, dengan melibatkan diri dalam pengembangan karakter bangsa yang bersumber dari ajaran Islam. Selain itu, istilah-istilah tersebut di atas, sebagai bukti bahwa al Qur'an telah memberikan kerangka aksiologis yang jelas di samping tentu saja kerangka ontologis dan epistemologis tentang tujuan pendidikan Islam. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam dalam tataran metafisis-filosofis dan praksisnya sangat kaya dengan pertimbangan teologis, spiritual, etis, moral.

Hal demikian, memberikan peluang bagi pendidik muslim memutakhirkan pembelajarannya dengan memasukkan nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari ajaran Islam dalam kurikulum. Salah satu bentuk pemutakhiran pembelajaran adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter Islam dalam semua materi pendidikan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan tidak boleh berhenti pada tataran metafisis-filosofis tetapi harus sudah pada *body of knowledge* yang dapat memberi gambaran yang utuh tentang nilai-nilai Islam dalam materi-materi pendidikan. Adapun salah satu bentuk integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan melalui pintu kurikulum yang sekarang disebut dengan KTSP. Integrasi nilai-nilai Islam dalam KTSP dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.



